

**TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM MENGENDALIKAN ANGKA
KELAHIRAN KEMATIAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI PROGRAM
KELUARGA BERENCANA IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 3 (22b)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN
2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN
PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM**

(Studi di Kantor Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AJENG INEZ MILZA AYUNINGSIH

NIM. 0610110006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

A. Judul

Tugas dan Fungsi Camat Dalam Mengendalikan Angka Kelahiran Ibu, Bayi dan Anak Melalui Program Keluarga Berencana Implementasi Pasal 2 Ayat 3 (22b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

B. Abstraksi

Upaya pemerintah di bidang pembangunan kesehatan melalui Program Keluarga Berencana ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Tanggung jawab Camat sebagai Perangkat Daerah dalam pengendalian jumlah penduduk sangat berperan penting demi lancarnya Program Gerakan Keluarga Berencana. Gerakan Keluarga Berencana di Kabupaten Malang membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, tetapi di Kecamatan Kepanjen masih ada fenomena yang menghambat pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan melihat pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam melaksanakan program keluarga berencana dengan implementasi pelaksanaan yang ada dilapangan, memilih lokasi penelitian di Kantor Kecamatan Kepanjen. Teknik penulurusan data dengan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta studi literature, pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan tehnik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat dalam Melaksanakan Program KB telah berjalan cukup baik dan lancer serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam penelitian ini juga ditemukan adanya faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan Keluarga Berencana. Menanggapi hambatan tersebut Camat telah mengupayakan berbagai solusi, yaitu melalui bentuk pelayanan, penyuluhan dan pembinaan ekonomi keluarga. Kemudian diharapkan Tugas dan Fungsi Camat perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga berbagai hambatan dari faktor sosial ekonomi, faktor sosial budaya, faktor agama dan faktor kesehatan dapat diatasi dengan baik.

Abstraction

Government efforts at well-being development area passes family planning program this done to depress indonesia citizen growth rate. Chief of a district responsibility as region ware in citizen total control so central important by the fluent family movement program berencana. Family planning movement at unlucky regency brings benefit big enough for society, but at district kepanjen still there phenomenon that retard family planning movement execution. In this watchfulness is author uses empirical law watchfulness kind and use method approaches juridical sosiologis that is with see task execution and chief of a district function in carry out family planning program with existing execution implementation at field, choose watchfulness location at district office kepanjen. Technics data livelihood with structured interview method and not structured with study literature, sample taking uses purposive sampling and technics analysis datata use to use descriptive analysis method. Conclusion from this watchfulness that task execution and chief of a district function in carry out program KB walk good enough and lancer with as according to law and regulation and in this watchfulness also found also hindrance factor in family planning execution. Receive obstacle chief of a district has strived for various solution, that is pass service form, elucidation and family economy construction. Then supposed task and chief of a district function necessary more increased again so that various obstacle from economy social factor, culture social factor, religion factor and well-being factor can be overcome well.

C. Kata Kunci

1. Camat

adalah pemimpin atau koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Kecamatan

adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

3. Kewenangan Pemerintah

adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

4. Propinsi

adalah pembagian wilayah administrative yang merupakan bagian dari Negara yang di pimpin oleh seorang gubernur.

5. Daerah otonom

adalah selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Persoalan kependudukan di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan penanganan secara komprehensif. Jumlah penduduk yg besar dengan pertumbuhan penduduk tinggi, kualitas rendah dan persebaran tidak merata. Dalam rangka pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk yang dengan jelas tertera dalam Pasal 2 Ayat 3 (22b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom yakni¹, “Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak”. Untuk itu dilaksanakan program kesehatan salah satunya melalui Program Keluarga Berencana. Kenyataannya masih banyak dihadapkan pada berbagai kendala yang berdampak pada lajunya pembangunan Nasional.

Pemerintah dan masyarakat merupakan dua aspek penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana. Oleh karena itu, Camat sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota semakin penting, artinya mengingat keterbatasan pemerintah untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia terutama di wilayah kecamatan.

Camat selaku perangkat daerah yang melaksanakan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kehidupan masyarakat disegala aspek. Camat selaku penanggungjawab utama dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatannya termasuk penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi pembinaan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat serta menumbuhkan mengembangkan dan membina kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengendalian terhadap masalah kependudukan.

Sampai saat ini Program Keluarga Berencana di Kabupaten Malang telah membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, namun di Kecamatan Kepanjen masih terdapat beberapa fenomena yang berpotensi menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana tersebut.

E. Masalah

1. Apakah pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam melaksanakan program keluarga berencana sudah sesuai dengan pasal 2 ayat 3 (22b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom?

¹Penjelasan Pasal 2 Ayat 3 (22b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*, Setneg, Jakarta.

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat tugas dan fungsi camat dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan yang kaitannya dengan program keluarga berencana dan bagaimana solusinya?

F. Metode

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Alasan penelitian pada Kantor Kecamatan Kecamatan Kepanjen dikarenakan ingin mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam melaksanakan program keluarga berencana.

2. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama². Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Cara pengambilan sampel dalam penulisan ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu dan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel responden tersebut adalah Camat Kecamatan Kepanjen, Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) di Kecamatan Kepanjen, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kelurahan dan masyarakat sekitar.

²Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 95.

c. Responden Penelitian

Responden penelitian ini adalah responden penelitian atau tokoh yang di wawancarai terkait dengan judul penelitian dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam melaksanakan program keluarga berencana berdasarkan pasal 2 ayat 3 (22b) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom yaitu:

- 1) Camat Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- 2) Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) di Kecamatan Kepanjen.
- 3) Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kelurahan.
- 4) Masyarakat Kecamatan Kepanjen berjumlah 15 orang.

3. Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada instansi Kantor Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian dan berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Analisa Data

Setelah data dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini telah tersedia dengan cukup, maka data tersebut akan di analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisi yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh

peneliti secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.

G. Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi geografis dan administrasi Kecamatan Kepanjen dapat dideskripsikan secara singkat sebagai berikut. Kecamatan Kepanjen merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Malang yang terletak di sebelah selatan dengan jarak \pm 18 km dari Kota Malang. Kecamatan Kepanjen memiliki luas 44,68 Km² yang terletak pada titik koordinat 112°17'10,9" – 112°57'00" Bujur Timur dan 55,11" – 8°26'34,45" Lintang Selatan. Dilihat dari sudut geografisnya, wilayah Kecamatan Kepanjen mempunyai batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagak.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kromengan dan Ngajum.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gondanglegi dan Bululawang.

Iklim di Kecamatan Kepanjen dengan iklim yang terdapat di kecamatan-kecamatan lain dalam Kabupaten Malang yang dipengaruhi oleh 2 (dua) musim yaitu : Musim Barat dan Musim Timur. Musim Barat terjadi pada bulan April-Oktober sedangkan Musim Timur terjadi pada bulan Oktober-April. Angin menghembus umumnya ke arah selatan dan timur. Disamping itu dikenal juga musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada bulan Mei – Agustus, sedangkan musim hujan di Kecamatan Kepanjen terjadi pada bulan September -April. Kecamatan Kepanjen dipimpin oleh seorang Camat dengan Ibu Kota Kecamatan terletak di Kelurahan Kepanjen. Kecamatan Kepanjen terbagi ke dalam wilayah administrasi yang meliputi 4 (empat) Kelurahan, 14 (empat belas) Desa, 77 (tujuh puluh tujuh) RW dan 467 (empat ratus enam puluh tujuh) RT.

a. Keadaan Demografi

Masyarakat merupakan salah satu modal dasar yang penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan. Agar terwujud tujuan pembangunan yang diinginkan maka kualitas dari manusia itu perlu mendapat perhatian, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Akan tetapi fenomena yang tampak akhir-akhir ini menunjukkan bahwa peningkatan penduduk secara kuantitas terus meningkat, namun peningkatan secara kualitas seakan-akan terabaikan. Untuk menanggulangi kenyataan tersebut khususnya dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk maka pemerintah melaksanakan Program Keluarga Berencana. Berdasarkan data hasil penelitian pada Kantor Kecamatan Kepanjen tahun 2012, jumlah penduduk Kecamatan Kepanjen sebanyak 101.250 jiwa terdiri dari laki-laki 49.224 jiwa dan perempuan 50.357 jiwa.

b. Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi suatu daerah sangat erat kaitannya dengan mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduknya. Adapun mata pencaharian penduduk Kecamatan Kepanjen pada umumnya adalah dibidang pertanian yaitu sebagai petani dan buruh tani.

c. Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya di Kecamatan Kepanjen masih melekat pada sikap hidup masyarakat, dimana setiap kegiatan umumnya diwarnai dengan kultur budaya dan adat istiadat. Komunikasi sehari-hari dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa. Kuatnya Budaya/Adat Istiadat Jawa cukup mempengaruhi pemahaman pada konsep-konsep baru yang ditawarkan oleh pemerintah khususnya Program Keluarga Berencana. Pada awalnya program ini sangat terasa asing bagi masyarakat di Kecamatan Kepanjen.

Seiring dengan perkembangan pendidikan dan pengetahuan maka pola pikir masyarakat Jawa semakin berkembang, sehingga berbagai kebiasaan lama secara berangsur mulai hilang.

d. Pendidikan

Dari segi pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Kepanjen terlihat bahwa kesadaran untuk bersekolah cukup tinggi, jumlah anak dan remaja yang bersekolah cukup besar, yaitu sebanyak 28.452 orang dan sekitar 5.618 orang anak dan remaja tidak bersekolah.

e. Keadaan Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian pihak-pihak terkait. Adanya sarana-sarana kesehatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menjaga kesehatan sehingga peningkatan kualitas sumber daya masyarakat juga akan dapat menjadi nyata.

f. Keadaan Pasangan Usia Subur

Pasangan Usia Subur dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pasangan Usia Subur Peserta Keluarga Berencana dan Pasangan Usia Subur bukan peserta Keluarga Berencana yang usianya berkisar antara 14-45 tahun. Adapun Pasangan Usia Subur yang ada di Kecamatan Kepanjen berjumlah 20.412 orang.

1) Pasangan Usia Subur Peserta Keluarga Berencana

Dari 20.412 orang Pasangan Usia Subur yang ada di Kecamatan Kepanjen, terdapat 16.205 orang Pasangan Usia Subur peserta Keluarga Berencana. Setiap tahunnya Pasangan Usia Subur peserta Keluarga Berencana cenderung mengalami peningkatan.

2) Pasangan Usia Subur Bukan Peserta Keluarga Berencana

Jumlah Pasangan Usia Subur yang bukan peserta Keluarga Berencana sebanyak 4.207 orang.

3) Gambaran Akseptor Keluarga Berencana

Untuk memberikan gambaran tentang partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana, dapat

dilihat dari akseptor peserta KB aktif, khususnya di Kecamatan Kepanjen terdapat 16.205 orang Pasangan Usia Subur peserta Keluarga Berencana, terdapat berbagai perangkat kontrasepsi yang digunakan oleh peserta Keluarga Berencana tersebut, perangkat ini berupa IUD (*Intra Uterine Device*) atau AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), MOP (Metode Operatif Pria), MOW (Metode Operatif Wanita), Implant/Susuk, suntik, pil, kondom dan obat vagina.

2. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

a. Keberadaan Gerakan Keluarga Berencana

Secara umum Kecamatan Kepanjen telah melaksanakan Program Keluarga Berencana meliputi seluruh desa dan kelurahan yang ada, hal ini sesuai dengan pernyataan Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) Kecamatan Kepanjen bahwa Program Keluarga Berencana ini telah mencakup seluruh Desa yang ada di Kecamatan Kepanjen. Setiap 6 desa terdapat satu orang penyuluh Keluarga Berencana dan apabila Desa tersebut tergolong Desa yang luas maka jumlah penyuluh Keluarga Berencana ditambah menjadi dua orang penyuluh³.

Menurut penjelasan Bapak A. Taufiq Juniarto, selaku Sekertaris Camat di Kecamatan Kepanjen, pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan telah berjalan baik dan lancar. Hal ini terlihat dari laporan yang diterima Seksi Kesejahteraan Sosial pada pertemuan di Kecamatan Kepanjen⁴.

Tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh beberapa orang di Desa tersebut, tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh adat dan tokoh agama juga menyatakan bahwa di Kecamatan Kepanjen telah dilaksanakan kegiatan Program Keluarga Berencana secara teratur dan mandiri⁵.

³ Hasil wawancara dengan petugas PPLKB Kecamatan Kepanjen pada tanggal 03 Oktober 2012.

⁴ Hasil wawancara Sekertaris Camat Kecamatan Kepanjen, wawancara dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2012.

⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kepanjen pada tanggal 19 September 2012.

Masyarakat meminta pertimbangan kepada tokoh agama melalui pertemuan dan konsultasi tersebut tokoh masyarakat dapat mengetahui bahwa di tiap-tiap desapelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana telah berjalan cukup baik. Masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur, cukup mengetahui atau telah mengetahui keberadaan kegiatan yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana⁶.

1) Pokok-Pokok Kegiatan Gerakan Keluarga Berencana

Pada tahun 2011/2012 melalui Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana di Propinsi Jawa Timur difokuskan kepada penjabaran misi Program Keluarga Berencana Nasional. Adapun penjabaran misi Program Keluarga Berencana Nasional meliputi lima aspek utama, yaitu :

a) Upaya Penyegaran Komitmen

Dari hasil penelitian, PPLKB Kecamatan Kepanjen sedang mengupayakan pembangunan komitmen yang kuat diantara berbagai instansi terkait dan tenaga operasional seperti penyuluh-penyuluh Desa serta kader-kader yang ada di Desa. Adapun pokok kegiatan dalam rangka penyegaran dan pembangunan komitmen meliputi :

- (1) Kegiatan yang berkaitan dengan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).
- (2) Penyiapan dukungan operasional disetiap tingkat wilayah.
- (3) Pengembangan mekanisme pemberdayaan keluarga melalui Program Keluarga Berencana disemua tingkatan wilayah, termasuk di Kecamatan Kepanjen dan desa-desa serta kelurahan yang ada didalamnya.
- (4) Pendayagunaan data wilayah kerja sesuai dengan kondisi, situasi dan potensi wilayah yang digunakan untuk kepentingan pembinaan dan pemeliharaan institusi- masyarakat pedesaan (PPKBD) kelompok keluarga sejahtera.
- (5) Peningkatan intensifikasi, penggerakan lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga pemerintah disemua tingkatan melalui

⁶ *Ibid.*

kegiatan bakti sosial, kesatuan gerak, penyediaan perangkat kontrasepsi melalui apotik dan klinik Keluarga Berencana swasta serta kegiatan lainnya.

- (6) Peningkatan wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan motivasi PLKB, PPLKBD, kader dan institusi masyarakat melalui pelatihan, pertemuan-pertemuan, rapat koordinasi disemua tingkatan, orientasi kader dan pemberian penghargaan bagi petugas yang berprestasi.

b) Penggerakan

Dalam penggerakan ini melibatkan dua kelompok yang menjadi penentu keberhasilan program, yaitu sektor pelaksanaan pelayanan program disatu sisi dan penerimaan pelayanan program di sisi yang lain. Adapun usaha dalam memotivasi minat masyarakat, adalah melalui pemberian pelayanan kontrasepsi secara Cuma-cuma bagi keluarga Pra Sejahtera dan sejahtera I, memotivasi peserta Keluarga Berencana Mandiri dengan cara terus menginformasikan dan mempromosikan sarana pelayanan Keluarga Berencana Mandiri yang tersedia melalui koperasi atau apotik.

c) Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

Upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat ini sangat berkaitan erat dengan partisipasi/keikutsertaan masyarakat terutama keluarga dalam berbagai kegiatan seperti pengembangan pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan keluarga dibidang usaha dan tenaga terampil.

d) Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan disini menekan pada partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana terutama berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi yang sangat berhubungan dengan status sosialnya sebagai seorang ibu yang perlu disiapkan sejak dini.

e) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Prima

Kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan keluarga melalui kegiatan Program Keluarga Berencana yang meliputi pelayanan kontrasepsi / konseling kontrasepsi dan pelayanan kesehatan keluarga.

3. Factor Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana

Adapun faktor-faktor pendukung dalam menyukseskan Program Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

a. Keaktifan Petugas Pelayanan Keluarga Berencana

Mengingat tugas dari PLKB cukup berat, karena ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana, namun dengan didasari pemahaman, penghayatan, dan pengamalan serta sikap mental yang tinggi maka segala tugas dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Dengan demikian dapat disimpulkan keaktifan dari PLKB sangat menentukan keberhasilan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kepanjen⁷.

b. Keikutsertaan Tim Penggerak PKK

Dalam usaha untuk mendukung suksesnya Program Keluarga Berencana, PKK telah meningkatkan peranannya dalam membantu memberikan penyuluhan, penggerakan, membina dan menyelenggarakan Posyandu. Kegiatan ibu-ibu PKK ini secara langsung ikut andil dalam menentukan suksesnya Program Keluarga Berencana, dari hasil yang telah dicapai dicatat dan dilaporkan kepada Camat sebagai penanggungjawab dalam menyukseskan Program Keluarga Berencana⁸.

c. Peran Serta Institusi Masyarakat

Peran serta institusi masyarakat juga berasal dari Institusi Masyarakat pedesaan yang terdiri dari Pembantu Penyuluhan Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Keterlibatan tokoh masyarakat dalam hal ini adalah

⁷ *Ibid.*

⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kepanjen pada tanggal 19 September 2012.

dengan memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat, bahwa keikutsertaan mereka dalam ber-KB akan dapat membantu pemeliharaan anak-anaknya secara lebih teratur agar menjadi yang berkualitas dimasa yang akan datang⁹.

d. Peran Serta Pemuka Agama

Dalam kegiatan-kegiatan, pemuka agama ikut aktif memberikan penyuluhan tentang Keluarga Berencana. Peran tokoh agama berfungsi sebagai pemberi motivasi bagi masyarakat dan dipandang sebagai pemegang nilai dan norma, maka sikap dan prilakunya juga dianut oleh masyarakat, walaupun ada sebagian tokoh agama yang masih fanatik malarang warganya untuk ber-KB¹⁰.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Kepanjen baik itu sarana pendidikan maupun sarana peribadatan sudah tersedia semuanya. Sarana lainnya adalah puskesmas, posyandu dan petugas tim medis dari setiap puskesmas yang ada di Kecamatan Kepanjen diikutsertakan dalam kegiatan yang diadakan di posyandu dan pos KB, misalnya puskesmas pembantu yang ada di desa Jenggolo juga ikut serta dalam penyuluhan apabila di desa tersebut diadakan penyuluhan.

f. Adanya Kerjasama Yang Baik Dari Semua Pihak

Pihak-pihak yang ikut ambil bagian dalam menyukseskan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kepanjen antara lain adalah Camat Kepanjen itu sendiri sebagai Pembina, PPLKB, PLKB, pemuka agama serta keikutsertaan tim penggerak PKK.

4. Factor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana

Berdasarkan hasil penelitian, didapat berbagai informasi mengenai hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Kecamatan Kepanjen. Adapun hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang cukup menonjol adalah¹¹ :

- a. Rendahnya penghasilan atau pendapatan masyarakat menyebabkan kemampuan untuk membeli perangkat atau alat kontrasepsi juga terbatas.
- b. Masyarakat lebih mengutamakan untuk bekerja mencari nafkah sehingga kesadaran untuk berpartisipasi dalam penyuluhan dan kegiatan yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana sangat kurang.
- c. Masyarakat kurang berminat untuk menggunakan sebagian dari perangkat atau alat kontrasepsi yang ditawarkan, karena ada anggapan pemakaian perangkat kontrasepsi dapat membahayakan/efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi.
- d. Masyarakat masih memegang prinsip bahwa banyak anak banyak rejeki/ masyarakat enggan ber-KB sebelum mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang diinginkan.
- e. Minimnya jumlah personil PLKB dan PPLKB, sehingga penyuluhan tidak dapat dilaksanakan secara merata.

5. Tugas dan Fungsi Camat Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan yang Kaitannya dengan Program Keluarga Berencana serta Upaya yang dilakukan.

Adapun upaya yang dilakukan Camat Kepanjen adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Melalui petugas operasional
- b. Pelayanan Kontrasepsi Secara Cuma-Cuma Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
- c. Pengayoman Peserta Keluarga Berencana
- d. Penyuluhan

Adapun bentuk-bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Camat Kepanjen, antara lain :

¹¹ Hasil wawancara dengan petugas PPLKB pada tanggal 03 Oktober 2012.

1) Pendekatan Melalui Pemahaman

Dalam pendekatan ini penyuluh memberikan arahan pengetahuan tentang Keluarga Berencana. Pendekatan melalui pemahaman ini juga dilakukan melalui Safari Keluarga Berencana, yang dilakukan setiap enam bulan sekali.

2) Pendekatan Melalui Media

Upaya pendekatan melalui media cetak sudah sering dilakukan sebagai contoh di setiap puskesmas, posyandu dan Pos KB yang ada di Kecamatan Kepanjen dipasang spanduk yang bertemakan Keluarga Berencana.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana Berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 (22b) sudah cukup baik hal ini dibuktikan dengan jumlah Pasangan Usia Subur peserta Keluarga Berencana yang telah mencapai 16.205 orang dari 20.412 orang jumlah Pasangan Usia Subur di Kecamatan Kepanjen.
- b. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kepanjen yakni keaktifan petugas pelayanan Keluarga Berencana, peranan Tim Penggerak PKK dengan kegiatan Posyandu, peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memperkenalkan dan mensukseskan program KB melalui ceramah keagamaan yang dilaksanakan tiga kali dalam seminggu, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Keluarga Berencana, serta kerjasama yang baik dari semua pihak. Adapun berbagai hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di masyarakat yang meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, adanya keyakinan terhadap budaya bahwa perlu adanya anak laki – laki dalam keluarga, adanya pencegahan

kehamilan dengan cara tradisional, kefanatikan terhadap agama dan tingkat pendidikan serta pengetahuan yang masih rendah, kecemasan yang berlebihan terhadap efek samping atau komplikasi dari penggunaan perangkat kontrasepsi, serta jumlah petugas yang kurang memadai.

- c. Upaya Camat dalam menyukseskan Program Keluarga Berencana antara lain melalui pelayanan melalui petugas operasional, pelayanan kontrasepsi secara Cuma-Cuma bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I, pengayoman peserta Keluarga Berencana, penyuluhan dan pembinaan ekonomi keluarga yang dikoordinasikan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran – saran yang dapat diberikan penulis antara lain :

- a. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang sudah baik tetap dipertahankan dan supaya lebih ditingkatkan lagi yang diimbangi dengan faktor pendidikan, ekonomi, agama, sosial budaya dan kesehatan, agar terwujud Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.
- b. Diharapkan kepada pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat selaku perangkat daerah agar dapat mengupayakan membantu seperti PKK dengan kegiatan Posyandunya dan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian selanjutnya secara rutin Camat dan para aparat harus mengadakan pertemuan dengan PKK, tokoh-tokoh masyarakat dan termasuk didalamnya petugas-petugas Program Keluarga Berencana.
- c. Camat disarankan untuk mengupayakan dalam menghadapi hambatan/kendala yang ada agar Program Keluarga Berencana dapat berjalan dengan sukses, yaitu :
 - 1) Faktor ekonomi
 - 2) Faktor pendidikan
 - 3) Faktor kesehatan
 - 4) Faktor agama
 - 5) Faktor sosial budaya

- d. Camat mengajukan pengusulan kepada pihak BKKBN dalam hal penambahan jumlah personil PLKB, supaya kegiatan Program Keluarga Berencana dapat dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh.

I. Daftar Pustaka.

1. Buku-buku

Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja GrafindoPersada. Jakarta.

Badudu, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Effendi, Lutfi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing. Malang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, Balai Pustaka. Jakarta.

M. Hardjon, Philipus, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suryokumoro, Herman, 2008, *Pedoman Penulisan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

Syafiie, Inu Kencana, 2007, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Edisi Pertama Cetakan Keempat, PT Refika Aditama. Bandung.

2. PeraturanPerundang – Undangan

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

3. Lain-lain

Hasil wawancara dengan sekretaris camat Kecamatan Kepanjen.

Hasil wawancara dengan petugas PPLKB dan PLKB Kecamatan Kepanjen

Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kepanjen.